Wapres Sebut Pemberian Vaksin Covid-19 Tak Gantikan Implementasi Protokol Kesehatan

JAKARTA (IM) – Wakil Presiden Na`ruf Amin menegaskan bahwa pemberian vaksinasi tidak menggantikan implementasi protokol kesehatan (prokes) di tengah masyarakat. Masyarakat harus tetap disiplin menagakkan prokes 3M (memakai masker,mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak atau tidak berkerumun).

Menurutnya, vaksinasi dapat membantu mengurangi tingkat keparahan seseorang apabila terkonfirmasi positif Covid-19.

"Tentunya pelaksanaan vaksinasi harus ditunjang dengan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya 3T (testing, tracing, treatment) dan masyarakat disiplin menegakkan protokol kesehatan 3M," ujar Ma`ruf Amin saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Rumah sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI), Selasa (7/9).

Maruf mengatakan bahwa pelaksanaan ini akan semakin mempercepat capaian vaksinasi di Tanah Air untuk membentuk kekebalan kelompok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, dengan jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 11.2 juta jiwa, maka kekebalan kelompok dapat terbentuk apabila sebanyak 8.3 juta jiwa penduduknya telah menerima vaksinasi Covid-19.

"Kunci terwujudnya keberhasilan penanganan Covid-19 sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah program vaksinasi yang berperan vital dan sangat penting," katanya, Selasa (7/9/2021).

Ia pun mengingatkan bahwa pemberian vaksinasi tidak menggantikan implementasi protokol kesehatan di tengah masyarakat. Menurutnya, vaksinasi dapat membantu mengurangi tingkat keparahan seseorang apabila terkonfirmasi positif Covid-19.

Seperti diketahui sentra vaksinasi di RSKGM FKG UI Salemba telah melaksanakan kegiatan vaksinasi mulai dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 17 September 2021. Target peserta dari sentra vaksinasi ini adalah 5.000 akseptor dengan target 500 orang per hari yang berasal dari warga sekitar kampus UI Salemba dan masyarakat umum.

Sentra vaksinasi ini juga mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan rumpun Ilmu Kesehatan UI. Termasuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, dan juga melibatkan peran serta dari Ikatan Alumni UI (ILUNI). ● **mar**

STRP Perjalanan Dalam Negeri Dicabut Mulai 7 September 2021

JAKARTA (IM) - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengeluarkan adendum atau ketentuan tambahan dari Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, Senin (6/9).

Ketentuan tambahan tersebut dibuat berdasarkan keputusan hasil rapat koordinasi (rakor) terbatas tingkat Menteri pada Selasa (31/8). Dalam Addendum SE Nomor 17 Tahun 2021, disebutkan bahwa ketentuan untuk melampirkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri dicabut mulai Selasa (7/9) hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Adapun moda transportasi yang disebutkan, antara lain kendaraan pribadi, umum, atau kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan. Berbagai kendaraan yang disebutkan di atas tidak diwajibkan untuk menunjukkan STRP, surat tugas, atau surat keterangan perjalanan lainnya.

Selain mengubah ketentuan STRP sebagai syarat perjalanan, adendum SE Nomor 17 Tahun 2021 juga menambahkan beberapa ketentuan baru. Pertama, setiap pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.

Kedua, setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa hasil tes reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) atau swab antigen dari setiap pelaku perjalanan yang hasilnya menunjukkan negatif.

Operator moda transportasi juga wajib memeriksa bukti vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap dari setiap pelaku perjalanan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Pemeriksaan hasil tes RT-PCR atauswab antigen beserta pemeriksaan bukti vaksinasi tersebut dilakukan saat check-in.

Addendum SE Nomor 17 Tahun 2021 akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan terakhir di lapangan atau hasil evaluasi Kementerian dan lembaga terkait. ● **mei**

Selamatkan Aset Rp53 Miliar, Pemkot Bandung Gandeng KPK

BANDUNG (IM) - Pemkot Bandung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelamatkan 203 aset milik negara yang nilainya lebih Rp 53 miliar.

Aset tersebut berupa 202 bidang tanah milik Pemkot Bandung senilai total Rp 53,1 Miliar dan pemulihan satu aset bermasalah berupa tanah Kelurahan Cigending seluas 974 meter persegi senilai Rp 892 juta.

"Kami apresiasi wali kota, Kajari, Asdatun Kejati dan Kepala Kantor Pertanahan yang telah berkerja bersama-sama. Sehingga tanah yang bermasalah di era pak wali kota bisa kembali ke pemilik sahnya," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan,Selasa (7/9).

Yudhiawan menjelaskan penyelamatan aset merupakan satu dari delapan area intervensi KPK dalam program pencegahan korupsi di daerah yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). Ada tiga fokus yang menjadi sorotan KPK dalam manajemen aset daerah, yaitu melakukan pengamanan dengan sertifikasi, penertiban dengan memastikan kewajiban pihak ketiga menyerahkan aset yang menjadi hak pemda, dan pemulihan aset.

"Kalau sekarang namanya pemulihan aset. Aset yang seharusnya milik pemerintah, maka yang menjadi milik pemerintah bagaimana pun harus dikembalikan ke negara. Tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh siapa pun," kata Yudhiawan menegaskan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Andi Kadandio saat menyerahkan sertifikat ini menyatakan komitmennya untuk mendukung pemda secara penuh melakukan sertifikasi atas aset-asetnya.

"Amanat undang-undang agraria tanah-tanah di seluruh Indonesia wajib didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum," ujar Andi.

Menurutnya, banyak pihak baik individu, pemerintah, maupun badan hukum dapat mengklaim kepemilikan tanah. Namun, Andi menegaskan, klaim tersebut tidak akan berdampak jika tidak memiliki sertifikat tanah.

"Hari ini kami akan serahkan satu sertifikat dari lima aset yang bermasalah, yaitu tanah kelurahan Cigending. Sedangkan, dari program registrasi nasional secara simbolis akan kami serahkan 202 sertifikat hak atas tanah seluas 2,5 hektare," kata Andi.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengapresiasi pendampingan Tim Korsupgah KPK dan segenap pihak yang telah bersinergi membantu pihaknya. Oded berharap dukungan akan terus diberikan kepada pihaknya untuk menyelesaikan aset-aset milik pemkot lainnya. ● **mei**

IDN/ANTARA

DPR SAHKAN UU P2 APBN 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dalam Rapat Paripurna pengesahan UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9). DPR secara resmi mengesahkan RUU P2 APBN 2020 menjadi undang-undang.

Pemerintah Diminta Bentuk Lagi TPF untuk Kasus Pembunuhan Munir

Temuan TPF lama dapat ditindaklanjuti TPF yang baru, salah satunya adalah terkait kemungkinan institusi negara yaitu BIN terlibat dalam pembunuhan Munir.

JAKARTA (IM) – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta pemerintah membentuk kembali tim pencari fakta (TPF) kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib. TPF baru harus bekerja dengan melanjutkan hasil temuan dari TPF lama.

"Setelah bertahun-tahun karena belum (kasus) ini belum tuntas patut dibuat TPF baru agar penyelidikan lebih maju," terang Asfinawati dalam diskusi virtual yang diadakan Tim Public Virtue

Asfinawati menjelaskan TPF baru penting dibentuk untuk melakukan penyelidikan dari berbagai kejanggalan atas kasus kematian Munir. Salah satunya adalah meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus bebas mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono dalam perkara ini.

"Misalnya salah satu tugasnya adalah meninjau ulang putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwoprandjono," katanya.

Asfinawati menyebut bahwa temuan TPF lama dapat ditindaklanjuti salah satunya adalah terkait kemungkinan institusi negara yaitu Badan Intelijen Negara (BIN) yang terlibat dalam pembunuhan Munir.

"Jadi hal ini masih bisa ditindaklanjuti baik dengan penegakan hukum atau dengan perbaikan keorganisasiannya. Agar tidak ada lagi lembaga-lembaga di Indonesia yang digunakan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Aktivis HAM Munir Said Thalib meninggal dunia di dalam pesawat Garuda Indonesia bernomor GA-974 pada 17 tahun yang lalu. Munir meninggal dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda pukul 08.10 waktu setempat.

Dalam penyelidikan diketahui kematian Munir akibat senyawa arsenik yang ada dalam tubuh aktivis HAM itu.

Dalam perkara ini mantan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan sebagai terpidana pembunuhan Munir, ia kemudian menjalani hukuman penjara selama 14 tahun.

Selain itu Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan juga menjadi terpidana dan divonis 1 tahun penjara karena menandatangani surat tugas untuk Pollycarpus untuk melakukan perjalanan bersama pesawat yang membawa Munir, meski status Pollycarpus sedang cuti. Dalam persidangan Indra membantah terlibat dalam kasus pembunuhan itu, namun dugaan muncul bahwa surat tugas itu dibuat Indra setelah menerima surat dari BIN.

Deputi V Bin Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono juga terseret dalam perkara ini. Muchdi menyerahkan diri sebelum diperiksa oleh kpolisian. Namun dalam persidangan 13 Desember 2008 Muchdi divonis bebas dari segala dakwaan. ● **han**

Setelah Keberatan 8 Terdakwa Ditolak, JPU Bakal Hadirkan Saksi di Persidangan

JAKARTA (IM) - Jaksa penuntut umum yang menangani perkara dugaan korupsi PT Asabri bakal menghadirkan saksi pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 13 September 2021. Hal ini menyusul keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menolak nota keberatan atau eksepsi delapan terdakwa pada kasus korupsi Asabri.

"Majelis hakim memerintahkan tim jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi ke persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa (7/9).

Leonard mengatakan, salah satu alasan majelis hakim menolak eksepsi terdakwa karena dakwaan JPU telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Selain itu, eksepsi yang diajukan para terdakwa sudah masuk ke dalam pokok perkara dan tidak termasuk dalam alasan mengajukan nota keberatan.

Diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak seluruh keberatan para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang PT Asabri (Persero). Dengan demikian, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian di persidangan.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Asabri dengan agenda pembacaan putusan sela, Senin (6/9). Putusan sela terhadap delapan terdakwa dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Ig Eko Purwanto dan para hakim anggota, yakni H Saifuddin, Rosmina, Ali Mutharom, dan Mulyono Dwi P. ● **han**

epack

LAPORAN KEUANGAN
PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk
Specialized in Rotogravure & Digital Printing for Plastic Packaging

Alamat Kantor
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C8 No.2 RT. 006 RW. 014,
CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG, JAKARTA BARAT,
DKI JAKARTA RAYA, INDONESIA
Tel. : 021 - 2966 7018 email : corsec@epack.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2021 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2020 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	4.757.108.638	2.340.058.964
Kas dibatasi penggunaanya	7.498.960.335	7.439.960.109
Piutang usaha		
Pihak berelasi	4.274.749.574	4.749.003.721
Pihak ketiga	35.430.031.827	36.762.087.465
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	2.145.946.726	3.036.985.410
Pihak ketiga	541.172.837	937.873.142
Persediaan	43.396.523.372	35.647.987.811
Pajak dibayar dimuka	304.599.487	1.745.001.981
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	31.528.982.269	31.336.350.821
Total aset lancar	**129.878.075.065**	**123.995.309.424**
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang usaha jangka panjang	490.500.000	1.160.958.169
Aset tetap - neto	212.653.328.170	219.203.073.442
Aset tak berwujud - neto	4.050.219.971	4.155.420.491
Aset pengampunan pajak	18.000.000.000	18.000.000.000
Uang jaminan	797.085.000	797.085.000
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	23.914.000
Aset pajak tangguhan - neto	625.223.057	112.635.811
Total Aset Tidak Lancar	**236.616.356.198**	**243.453.086.913**
TOTAL ASET	**366.494.431.263**	**367.448.396.337**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman jangka pendek	80.812.721.989	71.856.163.808
Utang usaha		
Pihak berelasi	3.366.119.179	2.271.005.278
Pihak ketiga	22.009.112.473	34.555.257.822
Uang muka penjualan	882.984.614	1.034.808.767
Utang lain-lain	1.696.802.369	257.950.000
Utang pajak	1.342.573.269	679.121.391
Beban akrual	3.184.219.002	4.276.759.650
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	6.201.070.222	5.367.539.868
Liabilitas sewa	9.694.959.165	4.434.443.358
Total Liabilitas Jangka Pendek	**129.190.562.282**	**124.733.049.942**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	3.346.390.690	4.059.453.936
Liabilitas sewa	20.271.756.901	26.782.499.974
Utang lain-lain jangka panjang	26.697.851.744	26.697.851.744
Liabilitas imbalan kerja	2.244.657.155	2.369.171.460
Liabilitas pajak tangguhan - neto	3.230.564.258	2.780.829.103
Total Liabilitas Jangka Panjang	**55.791.220.748**	**62.689.806.217**
TOTAL LIABILITAS	**184.981.783.030**	**187.422.856.159**
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Modal dasar - 3.303.400.000 saham dengan nominal Rp 50 per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.303.400.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 3.053.400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020	165.170.000.000	165.170.000.000
Tambahan modal disetor	10.488.884.611	10.488.884.611
Saldo laba	7.649.062.408	3.918.576.200
Penghasilan komprehensif lain	1.638.530.172	1.279.660.281
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	184.946.477.191	180.857.121.092
Kepentingan Nonpengendali	(3.433.828.958)	(831.580.914)
TOTAL EKUITAS	**181.512.648.233**	**180.025.540.178**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**366.494.431.263**	**367.448.396.337**

Catatan:
Informasi keuangan di atas merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2020 (diaudit) serta untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit).

Jakarta, 8 September 2021
Direksi
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
PENJUALAN	78.610.634.073	83.572.423.452
BEBAN POKOK PENJUALAN	(58.567.475.335)	(70.675.773.016)
LABA BRUTO	**20.043.158.738**	**12.896.650.436**
Beban penjualan	(3.894.349.825)	(3.017.080.710)
Beban umum dan administrasi	(4.887.642.225)	(3.521.741.717)
Beban keuangan	(8.017.206.202)	(5.650.339.254)
Penghasilan keuangan	67.215.437	244.787.348
Penghasilan (beban) lain-lain neto	(1.206.927.110)	1.338.481.188
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**2.104.248.813**	**2.290.757.291**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(978.564.139)	(594.103.676)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	**1.125.684.674**	**1.696.653.615**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Penjabaran laporan keuangan	(3.499.015)	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	450.632.526	(89.369.687)
Pajak penghasilan terkait	(85.710.130)	22.342.422
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH PAJAK	361.423.381	(67.027.265)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	**1.487.108.055**	**1.629.626.350**
LABA NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	3.730.486.208	2.454.432.037
Kepentingan nonpengendali	(2.604.801.534)	(757.778.422)
TOTAL	**1.125.684.674**	**1.696.653.615**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	4.089.356.099	2.387.404.772
Kepentingan nonpengendali	(2.602.248.044)	(757.778.422)
TOTAL	**1.487.108.055**	**1.629.626.350**
LABA NETO PER SAHAM DASAR	**2,12**	**1,61**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	82.223.316.863	101.009.329.889
Pembayaran pada pemasok	(67.989.835.077)	(95.256.692.604)
Pembayaran pada karyawan	(10.196.476.970)	(11.399.992.364)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	4.037.004.816	(5.647.355.079)
Penerimaan (Pembayaran) pajak penghasilan	1.125.290.233	(1.946.937.113)
Pembayaran beban keuangan	(7.949.990.765)	(5.405.551.906)
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	**(2.787.695.716)**	**(12.999.844.098)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(4.001.904.776)	(76.044.933.736)
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	**(4.001.904.776)**	**(76.044.933.736)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan setoran modal saham	-	23.623.742.298
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	1.438.852.369	-
Penerimaan pinjaman bank	98.101.337.977	-
Penerimaan utang sewa pembiayaan	-	41.398.697.888
Pembayaran pinjaman bank	(89.024.312.688)	(4.300.506.793)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(1.250.227.266)	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**9.265.650.392**	**60.721.933.393**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**2.476.049.900**	**(28.322.844.441)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**9.780.019.073**	**40.850.628.441**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**12.256.068.973**	**12.527.784.000**